



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan peningkatan kinerja realisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ke Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 09);

22. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang diterima oleh setiap Desa yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa.
14. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
18. Bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa.

**BAB II**  
**PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- (2) Alokasi bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan melalui dana transfer ke rekening kas Desa.

#### Pasal 3

Rincian bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, dialokasikan secara berkeadilan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, dialokasikan secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan jumlah penduduk setiap Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) berdasarkan jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) setiap Desa;
  - c. 5% (lima persen) berdasarkan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) setiap Desa; dan
  - d. 50% (lima puluh persen) berdasarkan jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (3), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF = [(0,25 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,5 \times Z3) + (0,50 \times Z4)] \times (DBHPR \text{ Daerah} - AD \text{ Daerah})$$

Keterangan:

- |    |   |
|----|---|
| AF | = Bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Desa, jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) setiap Desa, daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) setiap Desa dan jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa; |
| Z1 | = Rasio jumlah penduduk setiap Desa;  |

- Z2 = Rasio jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) setiap Desa;
- Z3 = Rasio daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) setiap Desa;
- Z4 = Rasio jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa;
- DBHPR Daerah = Pagu dana bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah;
- AD Daerah = Besaran AD secara berkeadilan untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah.
- (5) jumlah penduduk setiap Desa, jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) setiap Desa, daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) setiap Desa dan jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), bersumber dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 5

- (1) Besaran rincian bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.

### BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

#### Bagian Kesatu Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

#### Pasal 6

Penyaluran bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa (RKD).

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah dapat dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

- (2) Penyaluran bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan 1 (satu) kali setahun setelah kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran, berupa:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenan;
  - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenan; dan
  - c. Rencana anggaran biaya (RAB) bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam rekening kas umum Daerah (RKUD).

Bagian Kedua  
Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan  
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

Dana bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa yang dialokasikan dalam APBDesa, melalui kegiatan:

- a. Penyediaan operasional pemerintah Desa dalam rangka pendampingan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi Daerah;
- b. Belanja sertifikasi tanah fasilitas pemerintah Desa;
- c. Belanja upah petugas tagih PBB-P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) tingkat Desa;
- d. Belanja pelayanan administrasi umum dan kependudukan; dan
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan setelah pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa (RKD).
- (2) Laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah yang diterima pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 24 JANUARI 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 24 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2024**

**TANGGAL : 24 JANUARI 2024**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BESARAN RINCIAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
<b>1</b>	<b>TINANGGEEA</b>		<b>157.142.857</b>	<b>99.292.143</b>	<b>256.435.000</b>	
1	Lapoa	74.05.01.2003	7.142.857	5.462.143	<b>12.605.000</b>	
2	Asingi	74.05.01.2006	7.142.857	8.063.143	<b>15.206.000</b>	
3	Watu Melewe	74.05.01.2007	7.142.857	5.969.143	<b>13.112.000</b>	
4	Wadonggo	74.05.01.2009	7.142.857	5.885.143	<b>13.028.000</b>	
5	Bungin Permai	74.05.01.2010	7.142.857	3.491.143	<b>10.634.000</b>	
6	Palotawo	74.05.01.2014	7.142.857	3.340.143	<b>10.483.000</b>	
7	Lalonggasu	74.05.01.2019	7.142.857	6.289.143	<b>13.432.000</b>	
8	Molo Indah	74.05.01.2020	7.142.857	4.420.143	<b>11.563.000</b>	
9	Telutu Jaya	74.05.01.2021	7.142.857	13.599.143	<b>20.742.000</b>	
10	Torokeku	74.05.01.2023	7.142.857	2.540.143	<b>9.683.000</b>	
11	Lapulu	74.05.01.2024	7.142.857	4.591.143	<b>11.734.000</b>	
12	Roraya	74.05.01.2027	7.142.857	6.297.143	<b>13.440.000</b>	
13	Lanowulu	74.05.01.2029	7.142.857	2.440.143	<b>9.583.000</b>	
14	Lalo Watu	74.05.01.2030	7.142.857	3.267.143	<b>10.410.000</b>	
15	Tatangge	74.05.01.2032	7.142.857	2.032.143	<b>9.175.000</b>	
16	Wundumbolo	74.05.01.2033	7.142.857	1.090.143	<b>8.233.000</b>	
17	Pangoosi	74.05.01.2034	7.142.857	2.242.143	<b>9.385.000</b>	
18	Bomba-bomba	74.05.01.2035	7.142.857	6.533.143	<b>13.676.000</b>	
19	Akuni	74.05.01.2036	7.142.857	3.331.143	<b>10.474.000</b>	
20	Lasuai	74.05.01.2037	7.142.857	3.245.143	<b>10.388.000</b>	
21	Matambawi	74.05.01.2038	7.142.857	3.533.143	<b>10.676.000</b>	
22	Matandahi	74.05.01.2039	7.142.857	1.630.143	<b>8.773.000</b>	
<b>2</b>	<b>ANGATA</b>		<b>171.428.571</b>	<b>77.805.429</b>	<b>249.234.000</b>	
1	Pewutaa	74.05.02.2001	7.142.857	3.596.143	<b>10.739.000</b>	
2	Aopa	74.05.02.2002	7.142.857	5.460.143	<b>12.603.000</b>	
3	Motaha	74.05.02.2003	7.142.857	2.231.143	<b>9.374.000</b>	
4	Lamoen	74.05.02.2004	7.142.857	3.353.143	<b>10.496.000</b>	
5	Puusanggula	74.05.02.2005	7.142.857	2.634.143	<b>9.777.000</b>	
6	Puao	74.05.02.2006	7.142.857	2.954.143	<b>10.097.000</b>	
7	Sandey	74.05.02.2007	7.142.857	1.982.143	<b>9.125.000</b>	
8	Teteasa	74.05.02.2008	7.142.857	4.847.143	<b>11.990.000</b>	
9	Simbangu	74.05.02.2009	7.142.857	2.151.143	<b>9.294.000</b>	
10	Lamooso	74.05.02.2010	7.142.857	2.655.143	<b>9.798.000</b>	
11	Landabaro	74.05.02.2011	7.142.857	2.438.143	<b>9.581.000</b>	
12	Puungoni	74.05.02.2012	7.142.857	3.657.143	<b>10.800.000</b>	
13	Sandarsi Jaya	74.05.02.2013	7.142.857	2.410.143	<b>9.553.000</b>	
14	Puuroe	74.05.02.2014	7.142.857	2.997.143	<b>10.140.000</b>	
15	Lamoeri	74.05.02.2015	7.142.857	5.120.143	<b>12.263.000</b>	
16	Kasebo	74.05.02.2016	7.142.857	2.811.143	<b>9.954.000</b>	
17	Mataiwoi	74.05.02.2017	7.142.857	2.434.143	<b>9.577.000</b>	
18	Angata	74.05.02.2018	7.142.857	3.983.143	<b>11.126.000</b>	
19	Pudambu	74.05.02.2019	7.142.857	7.134.143	<b>14.277.000</b>	
20	Matabondu	74.05.02.2020	7.142.857	2.921.143	<b>10.064.000</b>	
21	Mokoau	74.05.02.2040	7.142.857	2.728.143	<b>9.871.000</b>	
22	Boloso	74.05.02.2041	7.142.857	3.273.143	<b>10.416.000</b>	
23	Puulipu	74.05.02.2042	7.142.857	2.197.143	<b>9.340.000</b>	
24	Langgea Indah	74.05.02.2043	7.142.857	1.836.143	<b>8.979.000</b>	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
<b>3</b>	<b>ANDOOLO</b>		<b>57.142.857</b>	<b>38.392.143</b>	<b>95.535.000</b>	
1	Andoolo	74.05.03.2001	7.142.857	3.384.143	10.527.000	
2	Alengge Agung	74.05.03.2004	7.142.857	4.935.143	12.078.000	
3	Bumi Raya	74.05.03.2010	7.142.857	6.059.143	13.202.000	
4	Lalobao	74.05.03.2014	7.142.857	6.095.143	13.238.000	
5	Lalunggombu	74.05.03.2015	7.142.857	5.105.143	12.248.000	
6	Wunduwatu	74.05.03.2026	7.142.857	6.886.143	14.029.000	
7	Punggapu	74.05.03.2031	7.142.857	2.778.143	9.921.000	
8	Ataku	74.05.03.2033	7.142.857	3.149.143	10.292.000	
<b>4</b>	<b>PALANGGA</b>		<b>100.000.000</b>	<b>61.102.000</b>	<b>161.102.000</b>	
1	Aosole	74.05.04.2003	7.142.857	5.234.143	12.377.000	
2	Anggondara	74.05.04.2005	7.142.857	4.010.143	11.153.000	
3	Eewa	74.05.04.2007	7.142.857	2.767.143	9.910.000	
4	Kiaea	74.05.04.2008	7.142.857	7.069.143	14.212.000	
5	Mekar Sari	74.05.04.2011	7.142.857	6.886.143	14.029.000	
6	Onembute	74.05.04.2013	7.142.857	3.531.143	10.674.000	
7	Waworaha	74.05.04.2018	7.142.857	3.991.143	11.134.000	
8	Watumerembe	74.05.04.2019	7.142.857	4.935.143	12.078.000	
9	Wawouru	74.05.04.2022	7.142.857	4.807.143	11.950.000	
10	Alakaya	74.05.04.2025	7.142.857	4.383.143	11.526.000	
11	Wawonggura	74.05.04.2029	7.142.857	3.320.143	10.463.000	
12	Kapu Jaya	74.05.04.2030	7.142.857	3.376.143	10.519.000	
13	Watudemba	74.05.04.2031	7.142.857	3.031.143	10.174.000	
14	Sanggi-Sanggi	74.05.04.2032	7.142.857	3.760.143	10.903.000	
<b>5</b>	<b>LANDONO</b>		<b>78.571.429</b>	<b>38.713.571</b>	<b>117.285.000</b>	
1	Lalunggapu	74.05.05.2008	7.142.857	3.575.143	10.718.000	
2	Wata Benua	74.05.05.2009	7.142.857	4.421.143	11.564.000	
3	Tridana Mulia	74.05.05.2014	7.142.857	2.591.143	9.734.000	
4	Landono Dua	74.05.05.2015	7.142.857	4.609.143	11.752.000	
5	Amotowo	74.05.05.2016	7.142.857	5.036.143	12.179.000	
6	Abenggi	74.05.05.2022	7.142.857	4.966.143	12.109.000	
7	Arongo	74.05.05.2023	7.142.857	2.642.143	9.785.000	
8	Endanga	74.05.05.2024	7.142.857	2.091.143	9.234.000	
9	Wonua Sangia	74.05.05.2032	7.142.857	3.027.143	10.170.000	
10	Lakomea	74.05.05.2035	7.142.857	2.358.143	9.501.000	
11	Morini Mulya	74.05.05.2042	7.142.857	3.396.143	10.539.000	
<b>6</b>	<b>LAINEA</b>		<b>85.714.286</b>	<b>51.341.714</b>	<b>137.056.000</b>	
1	Lalunggombu	74.05.06.2011	7.142.857	6.218.143	13.361.000	
2	Watumeeto	74.05.06.2013	7.142.857	5.294.143	12.437.000	
3	Pamandati	74.05.06.2014	7.142.857	7.130.143	14.273.000	
4	Pangan Jaya	74.05.06.2015	7.142.857	5.337.143	12.480.000	
5	Aoreo	74.05.06.2020	7.142.857	3.215.143	10.358.000	
6	Kaindi	74.05.06.2021	7.142.857	2.952.143	10.095.000	
7	Matabubu Jaya	74.05.06.2022	7.142.857	3.522.143	10.665.000	
8	Lainea	74.05.06.2024	7.142.857	5.474.143	12.617.000	
9	Molinese	74.05.06.2025	7.142.857	3.090.143	10.233.000	
10	Polewali	74.05.06.2026	7.142.857	3.729.143	10.872.000	
11	Bangun Jaya	74.05.06.2027	7.142.857	2.571.143	9.714.000	
12	Kalo-kalo	74.05.06.2028	7.142.857	2.808.143	9.951.000	
<b>7</b>	<b>KONDA</b>		<b>114.285.714</b>	<b>94.532.286</b>	<b>208.818.000</b>	
1	Puosu Jaya	74.05.07.2002	7.142.857	7.905.143	15.048.000	
2	Lamomea	74.05.07.2003	7.142.857	11.489.143	18.632.000	
3	Alebo	74.05.07.2004	7.142.857	5.454.143	12.597.000	
4	Morome	74.05.07.2005	7.142.857	4.305.143	11.448.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
5	Lebo Jaya	74.05.07.2006	7.142.857	5.396.143	12.539.000	
6	Lambusa	74.05.07.2007	7.142.857	9.353.143	16.496.000	
7	Pombulaa Jaya	74.05.07.2008	7.142.857	2.788.143	9.931.000	
8	Ambololi	74.05.07.2009	7.142.857	3.528.143	10.671.000	
9	Tanea	74.05.07.2010	7.142.857	7.480.143	14.623.000	
10	Masagena	74.05.07.2011	7.142.857	4.129.143	11.272.000	
11	Cialam Jaya	74.05.07.2012	7.142.857	8.803.143	15.946.000	
12	Wonua	74.05.07.2013	7.142.857	4.894.143	12.037.000	
13	Lawoila	74.05.07.2014	7.142.857	3.874.143	11.017.000	
14	Lalowiu	74.05.07.2019	7.142.857	7.162.143	14.305.000	
15	Amohalo	74.05.07.2020	7.142.857	1.839.143	8.982.000	
16	Konda Satu	74.05.07.2024	7.142.857	6.131.143	13.274.000	
<b>8</b>	<b>RANOMEETO</b>		<b>78.571.429</b>	<b>139.645.571</b>	<b>218.217.000</b>	
1	Onewila	74.05.08.2002	7.142.857	23.448.143	30.591.000	
2	Boro-Boro R	74.05.08.2004	7.142.857	4.885.143	12.028.000	
3	Rambu-rambu Jaya	74.05.08.2005	7.142.857	6.873.143	14.016.000	
4	Amoito	74.05.08.2008	7.142.857	6.501.143	13.644.000	
5	Ambaipua	74.05.08.2014	7.142.857	14.496.143	21.639.000	
6	Ranooha	74.05.08.2015	7.142.857	17.582.143	24.725.000	
7	Langgea	74.05.08.2016	7.142.857	15.241.143	22.384.000	
8	Kota Bangun	74.05.08.2017	7.142.857	14.684.143	21.827.000	
9	Laikaha	74.05.08.2019	7.142.857	15.928.143	23.071.000	
10	Duduria	74.05.08.2020	7.142.857	4.223.143	11.366.000	
11	Amoito Siama	74.05.08.2021	7.142.857	15.783.143	22.926.000	
<b>9</b>	<b>KOLONO</b>		<b>142.857.143</b>	<b>44.401.857</b>	<b>187.259.000</b>	
1	Sawa	74.05.09.2002	7.142.857	2.301.143	9.444.000	
2	Langgowala	74.05.09.2003	7.142.857	2.530.143	9.673.000	
3	Waworano	74.05.09.2004	7.142.857	1.768.143	8.911.000	
4	Matandahi	74.05.09.2005	7.142.857	2.164.143	9.307.000	
5	Puupi	74.05.09.2006	7.142.857	2.221.143	9.364.000	
6	Mataiwoi	74.05.09.2007	7.142.857	2.559.143	9.702.000	
7	Tiraosu	74.05.09.2008	7.142.857	2.042.143	9.185.000	
8	Mondoe Jaya	74.05.09.2009	7.142.857	1.804.143	8.947.000	
9	Ulusena Jaya	74.05.09.2010	7.142.857	1.298.143	8.441.000	
10	Lamotau	74.05.09.2011	7.142.857	2.685.143	9.828.000	
11	Awunio	74.05.09.2012	7.142.857	2.765.143	9.908.000	
12	Meletumbo	74.05.09.2013	7.142.857	2.742.143	9.885.000	
13	Roda	74.05.09.2014	7.142.857	3.421.143	10.564.000	
14	Lamapu	74.05.09.2016	7.142.857	1.911.143	9.054.000	
15	Andinete	74.05.09.2025	7.142.857	3.117.143	10.260.000	
16	Wawoosu	74.05.09.2026	7.142.857	2.027.143	9.170.000	
17	Alosi	74.05.09.2028	7.142.857	1.226.143	8.369.000	
18	Silea	74.05.09.2029	7.142.857	3.292.143	10.435.000	
19	Puudongi	74.05.09.2030	7.142.857	1.423.143	8.566.000	
20	Sarandua	74.05.09.2031	7.142.857	1.103.143	8.246.000	
<b>10</b>	<b>MORAMO</b>		<b>135.714.286</b>	<b>104.598.714</b>	<b>240.313.000</b>	
1	Amohola	74.05.10.2010	7.142.857	10.417.143	17.560.000	
2	Tambosupa	74.05.10.2011	7.142.857	3.731.143	10.874.000	
3	Marga Cinta	74.05.10.2012	7.142.857	17.833.143	24.976.000	
4	Moramo	74.05.10.2013	7.142.857	4.208.143	11.351.000	
5	Bakutaru	74.05.10.2014	7.142.857	2.608.143	9.751.000	
6	Lakomea	74.05.10.2015	7.142.857	2.921.143	10.064.000	
7	Landipo	74.05.10.2016	7.142.857	7.428.143	14.571.000	
8	Lamboos	74.05.10.2017	7.142.857	5.279.143	12.422.000	
9	Pudaria Jaya	74.05.10.2018	7.142.857	6.144.143	13.287.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
10	Sumber Sari	74.05.10.2019	7.142.857	4.203.143	11.346.000	
11	Ulusena	74.05.10.2020	7.142.857	4.314.143	11.457.000	
12	Panambea Barata	74.05.10.2021	7.142.857	2.780.143	9.923.000	
13	Wowosunggu	74.05.10.2022	7.142.857	6.135.143	13.278.000	
14	Wawondengi	74.05.10.2023	7.142.857	10.128.143	17.271.000	
15	Watu Porambaa	74.05.10.2025	7.142.857	3.214.143	10.357.000	
16	Wonua Jaya	74.05.10.2026	7.142.857	3.739.143	10.882.000	
17	Bisikori	74.05.10.2027	7.142.857	4.090.143	11.233.000	
18	Ranooha Raya	74.05.10.2028	7.142.857	3.639.143	10.782.000	
19	Selabangga	74.05.10.2029	7.142.857	1.785.143	8.928.000	
<b>11</b>	<b>LAONTI</b>		<b>135.714.286</b>	<b>39.396.714</b>	<b>175.111.000</b>	
1	Labuan Beropa	74.05.11.2001	7.142.857	2.776.143	9.919.000	
2	Tambolosu	74.05.11.2002	7.142.857	3.197.143	10.340.000	
3	Woru Woru	74.05.11.2003	7.142.857	1.301.143	8.444.000	
4	Tambeanga	74.05.11.2004	7.142.857	2.008.143	9.151.000	
5	Labotaone	74.05.11.2005	7.142.857	2.002.143	9.145.000	
6	Batu Jaya	74.05.11.2006	7.142.857	1.878.143	9.021.000	
7	Namu	74.05.11.2007	7.142.857	2.061.143	9.204.000	
8	Malaringgi	74.05.11.2008	7.142.857	1.960.143	9.103.000	
9	Tue Tue	74.05.11.2009	7.142.857	2.703.143	9.846.000	
10	Sangi Sangi	74.05.11.2010	7.142.857	2.596.143	9.739.000	
11	Ulu Sawa	74.05.11.2011	7.142.857	2.704.143	9.847.000	
12	Lawisata	74.05.11.2012	7.142.857	1.524.143	8.667.000	
13	Kondono	74.05.11.2013	7.142.857	1.841.143	8.984.000	
14	Peo Indah	74.05.11.2014	7.142.857	1.443.143	8.586.000	
15	Puundirangga	74.05.11.2015	7.142.857	1.576.143	8.719.000	
16	Cempedak	74.05.11.2016	7.142.857	2.113.143	9.256.000	
17	Laonti	74.05.11.2017	7.142.857	1.795.143	8.938.000	
18	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	7.142.857	2.004.143	9.147.000	
19	Wandaeha	74.05.11.2020	7.142.857	1.912.143	9.055.000	
<b>12</b>	<b>LALEMBUU</b>		<b>121.428.571</b>	<b>96.007.429</b>	<b>217.436.000</b>	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	7.142.857	9.406.143	16.549.000	
2	Atari Jaya	74.05.12.2002	7.142.857	8.674.143	15.817.000	
3	Mokupa Jaya	74.05.12.2003	7.142.857	3.350.143	10.493.000	
4	Lambandia	74.05.12.2004	7.142.857	5.200.143	12.343.000	
5	Kapuwila	74.05.12.2006	7.142.857	7.753.143	14.896.000	
6	Puunangga	74.05.12.2007	7.142.857	9.007.143	16.150.000	
7	Teteinea	74.05.12.2008	7.142.857	4.325.143	11.468.000	
8	Puurema Subur	74.05.12.2009	7.142.857	3.280.143	10.423.000	
9	Lalembuu Jaya	74.05.12.2010	7.142.857	4.151.143	11.294.000	
10	Sukamukti	74.05.12.2011	7.142.857	9.968.143	17.111.000	
11	Potuho Jaya	74.05.12.2012	7.142.857	9.182.143	16.325.000	
12	Mondoke	74.05.12.2013	7.142.857	2.542.143	9.685.000	
13	Sumber Jaya	74.05.12.2014	7.142.857	9.641.143	16.784.000	
14	Merongga Raya	74.05.12.2015	7.142.857	2.110.143	9.253.000	
15	Tombeleu	74.05.12.2016	7.142.857	3.002.143	10.145.000	
16	Padaleu	74.05.12.2017	7.142.857	2.552.143	9.695.000	
17	Lalouesamba	74.05.12.2018	7.142.857	1.862.143	9.005.000	
<b>13</b>	<b>BENUA</b>		<b>85.714.286</b>	<b>59.547.714</b>	<b>145.262.000</b>	
1	Lamara	74.05.13.2001	7.142.857	6.041.143	13.184.000	
2	Puuosu	74.05.13.2002	7.142.857	3.447.143	10.590.000	
3	Benua Utama	74.05.13.2003	7.142.857	4.636.143	11.779.000	
4	Horodopi	74.05.13.2004	7.142.857	10.318.143	17.461.000	
5	Benua	74.05.13.2005	7.142.857	4.411.143	11.554.000	
6	Palowewu	74.05.13.2006	7.142.857	4.313.143	11.456.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
7	Punggawukawu	74.05.13.2007	7.142.857	6.323.143	13.466.000	
8	Uelawa	74.05.13.2008	7.142.857	5.724.143	12.867.000	
9	Tetehaka	74.05.13.2009	7.142.857	2.846.143	9.989.000	
10	Awalo	74.05.13.2010	7.142.857	4.468.143	11.611.000	
11	Kosambi	74.05.13.2011	7.142.857	2.889.143	10.032.000	
12	Puuwehuko	74.05.13.2012	7.142.857	4.130.143	11.273.000	
<b>14</b>	<b>PALANGGA SELATAN</b>		<b>64.285.714</b>	<b>49.152.286</b>	<b>113.438.000</b>	
1	Lakara	74.05.14.2002	7.142.857	3.016.143	10.159.000	
2	Parasi	74.05.14.2003	7.142.857	6.186.143	13.329.000	
3	Ulu Lakara	74.05.14.2004	7.142.857	10.171.143	17.314.000	
4	Watumbohoti	74.05.14.2005	7.142.857	4.005.143	11.148.000	
5	Wawowonua	74.05.14.2006	7.142.857	4.022.143	11.165.000	
6	Waturapa	74.05.14.2007	7.142.857	3.532.143	10.675.000	
7	Koeono	74.05.14.2008	7.142.857	3.016.143	10.159.000	
8	Lalowua	74.05.14.2009	7.142.857	12.192.143	19.335.000	
9	Mondoe	74.05.14.2010	7.142.857	3.011.143	10.154.000	
<b>15</b>	<b>MOWILA</b>		<b>142.857.143</b>	<b>89.641.857</b>	<b>232.499.000</b>	
1	Kondoano	74.05.15.2001	7.142.857	6.408.143	13.551.000	
2	Punggulahi	74.05.15.2002	7.142.857	3.162.143	10.305.000	
3	Lamolori	74.05.15.2003	7.142.857	4.930.143	12.073.000	
4	Toluwonua	74.05.15.2004	7.142.857	4.106.143	11.249.000	
5	Mulyasari	74.05.15.2005	7.142.857	3.981.143	11.124.000	
6	Rakawuta	74.05.15.2006	7.142.857	4.304.143	11.447.000	
7	Ranoaopa	74.05.15.2007	7.142.857	3.707.143	10.850.000	
8	Mowila	74.05.15.2008	7.142.857	5.194.143	12.337.000	
9	Lalosingi	74.05.15.2009	7.142.857	4.900.143	12.043.000	
10	Wuura	74.05.15.2010	7.142.857	3.383.143	10.526.000	
11	Pudahoa	74.05.15.2011	7.142.857	5.107.143	12.250.000	
12	Monapa	74.05.15.2012	7.142.857	7.101.143	14.244.000	
13	Puuwehuko	74.05.15.2013	7.142.857	6.319.143	13.462.000	
14	Ranombayasa	74.05.15.2014	7.142.857	2.887.143	10.030.000	
15	Wonua Kongga	74.05.15.2015	7.142.857	1.462.143	8.605.000	
16	Mataiwoi	74.05.15.2016	7.142.857	4.069.143	11.212.000	
17	Lamebara	74.05.15.2017	7.142.857	7.968.143	15.111.000	
18	Tetesingi	74.05.15.2018	7.142.857	3.814.143	10.957.000	
19	Wonua Sari	74.05.15.2019	7.142.857	2.787.143	9.930.000	
20	Wonua Monapa	74.05.15.2020	7.142.857	4.050.143	11.193.000	
<b>16</b>	<b>MORAMO UTARA</b>		<b>64.285.714</b>	<b>60.197.286</b>	<b>124.483.000</b>	
1	Puasana	74.05.16.2001	7.142.857	2.939.143	10.082.000	
2	Tanjung Tiram	74.05.16.2003	7.142.857	27.309.143	34.452.000	
3	Wawatu	74.05.16.2004	7.142.857	7.302.143	14.445.000	
4	Sanggula	74.05.16.2005	7.142.857	4.868.143	12.011.000	
5	Lombuea	74.05.16.2006	7.142.857	6.241.143	13.384.000	
6	Mekar Jaya	74.05.16.2007	7.142.857	4.444.143	11.587.000	
7	Lamokula	74.05.16.2008	7.142.857	2.391.143	9.534.000	
8	Mata Wawatu	74.05.16.2009	7.142.857	2.511.143	9.654.000	
9	Mata Lamokula	74.05.16.2010	7.142.857	2.191.143	9.334.000	
<b>17</b>	<b>BUKE</b>		<b>114.285.714</b>	<b>101.455.286</b>	<b>215.741.000</b>	
1	Andoolo Utama	74.05.17.2001	7.142.857	11.040.143	18.183.000	
2	Anggokoti	74.05.17.2002	7.142.857	10.102.143	17.245.000	
3	Asembu Mulya	74.05.17.2003	7.142.857	6.960.143	14.103.000	
4	Awalo	74.05.17.2004	7.142.857	3.745.143	10.888.000	
5	Adaka Jaya	74.05.17.2005	7.142.857	6.298.143	13.441.000	
6	Buke	74.05.17.2006	7.142.857	3.807.143	10.950.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
7	Pelandia	74.05.17.2007	7.142.857	3.065.143	10.208.000	
8	Puudaria	74.05.17.2008	7.142.857	5.859.143	13.002.000	
9	Rahamendaa	74.05.17.2009	7.142.857	5.599.143	12.742.000	
10	Silea Jaya	74.05.17.2010	7.142.857	10.937.143	18.080.000	
11	Tirta Martani	74.05.17.2011	7.142.857	6.251.143	13.394.000	
12	Tetenggolasa	74.05.17.2012	7.142.857	5.377.143	12.520.000	
13	Adayu Indah	74.05.17.2013	7.142.857	5.855.143	12.998.000	
14	Wonua Maroa	74.05.17.2014	7.142.857	5.451.143	12.594.000	
15	Wulele Jaya	74.05.17.2015	7.142.857	6.681.143	13.824.000	
16	Ranooha Lestari	74.05.17.2016	7.142.857	4.426.143	11.569.000	
<b>18</b>	<b>WOLASI</b>		<b>50.000.000</b>	<b>24.669.000</b>	<b>74.669.000</b>	
1	Wolasi	74.05.18.2001	7.142.857	2.446.143	9.589.000	
2	Aoma	74.05.18.2002	7.142.857	2.072.143	9.215.000	
3	Amoito Jaya	74.05.18.2003	7.142.857	4.088.143	11.231.000	
4	Leleka	74.05.18.2004	7.142.857	5.566.143	12.709.000	
5	Mata Wolasi	74.05.18.2005	7.142.857	3.550.143	10.693.000	
6	Aunupe	74.05.18.2007	7.142.857	3.343.143	10.486.000	
7	Ranowila	74.05.07.2021	7.142.857	3.603.143	10.746.000	
<b>19</b>	<b>LAEYA</b>		<b>107.142.857</b>	<b>84.040.143</b>	<b>191.183.000</b>	
1	Aepodu	74.05.19.2003	7.142.857	7.058.143	14.201.000	
2	Rambu Rambu	74.05.19.2004	7.142.857	6.468.143	13.611.000	
3	Ombu Ombu Jaya	74.05.19.2005	7.142.857	5.139.143	12.282.000	
4	Lamong Jaya	74.05.19.2006	7.142.857	9.339.143	16.482.000	
5	Lerepako	74.05.19.2007	7.142.857	6.442.143	13.585.000	
6	Ambesea	74.05.19.2008	7.142.857	4.799.143	11.942.000	
7	Laeya	74.05.19.2009	7.142.857	7.965.143	15.108.000	
8	Labokeo	74.05.19.2010	7.142.857	9.408.143	16.551.000	
9	Torobulu	74.05.19.2011	7.142.857	6.986.143	14.129.000	
10	Anduna	74.05.19.2012	7.142.857	3.919.143	11.062.000	
11	Ambakumina	74.05.19.2013	7.142.857	3.030.143	10.173.000	
12	Lambakara	74.05.19.2014	7.142.857	3.402.143	10.545.000	
13	Anggoroboti	74.05.19.2015	7.142.857	3.887.143	11.030.000	
14	Wonua Kongga	74.05.19.2016	7.142.857	3.705.143	10.848.000	
15	Puuwulo	74.05.19.2017	7.142.857	2.491.143	9.634.000	
<b>20</b>	<b>BAITO</b>		<b>57.142.857</b>	<b>42.811.143</b>	<b>99.954.000</b>	
1	Amasara	74.05.20.2001	7.142.857	4.811.143	11.954.000	
2	Baito	74.05.20.2002	7.142.857	4.710.143	11.853.000	
3	Matabubu	74.05.20.2003	7.142.857	4.471.143	11.614.000	
4	Mekar Jaya	74.05.20.2004	7.142.857	5.232.143	12.375.000	
5	Sambahule	74.05.20.2005	7.142.857	4.835.143	11.978.000	
6	Tolihe	74.05.20.2006	7.142.857	4.260.143	11.403.000	
7	Wonua Raya	74.05.20.2007	7.142.857	8.610.143	15.753.000	
8	Ahuangguluri	74.05.20.2008	7.142.857	5.881.143	13.024.000	
<b>21</b>	<b>BASALA</b>		<b>64.285.714</b>	<b>60.588.286</b>	<b>124.874.000</b>	
1	Iwoimendoro	74.05.21.2001	7.142.857	8.619.143	15.762.000	
2	Epeesi	74.05.21.2002	7.142.857	7.939.143	15.082.000	
3	Lere	74.05.21.2003	7.142.857	5.783.143	12.926.000	
4	Lipumasagena	74.05.21.2004	7.142.857	6.964.143	14.107.000	
5	Lambandia	74.05.21.2005	7.142.857	5.019.143	12.162.000	
6	Polo Pololi	74.05.21.2006	7.142.857	5.181.143	12.324.000	
7	Basala	74.05.21.2007	7.142.857	5.252.143	12.395.000	
8	Tombekuku	74.05.21.2008	7.142.857	11.714.143	18.857.000	
9	Teporombua	74.05.21.2009	7.142.857	4.116.143	11.259.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DASAR (60 %) (Rp.)	ALOKASI FORMULA (40%) (Rp.)	TOTAL DBH & RET. Daerah (Rp.)	KET.
<b>22</b>	<b>RANOMEETO BARAT</b>		<b>64.285.714</b>	<b>39.045.286</b>	<b>103.331.000</b>	
1	Amokuni	74.05.22.2001	7.142.857	3.754.143	10.897.000	
2	Sindang Kasih	74.05.22.2002	7.142.857	8.806.143	15.949.000	
3	Jati Bali	74.05.22.2003	7.142.857	7.321.143	14.464.000	
4	Laikandonga	74.05.22.2004	7.142.857	3.613.143	10.756.000	
5	Boro-Boro Lameuru	74.05.22.2005	7.142.857	2.637.143	9.780.000	
6	Opaasi	74.05.22.2006	7.142.857	2.694.143	9.837.000	
7	Lameuru	74.05.22.2007	7.142.857	4.117.143	11.260.000	
8	Abeko	74.05.22.2008	7.142.857	3.331.143	10.474.000	
9	Tunduno	74.05.22.2009	7.142.857	2.771.143	9.914.000	
<b>23</b>	<b>KOLONO TIMUR</b>		<b>71.428.571</b>	<b>25.783.429</b>	<b>97.212.000</b>	
1	Rambu-Rambu	74.05.23.2001	7.142.857	1.302.143	8.445.000	
2	Lambanggi	74.05.23.2002	7.142.857	2.537.143	9.680.000	
3	Tumbu-tumbu Jaya	74.05.23.2003	7.142.857	3.990.143	11.133.000	
4	Ngapawali	74.05.23.2004	7.142.857	4.375.143	11.518.000	
5	Batu Putih	74.05.23.2005	7.142.857	3.019.143	10.162.000	
6	Rumba-rumba	74.05.23.2006	7.142.857	2.557.143	9.700.000	
7	Ampera	74.05.23.2007	7.142.857	1.957.143	9.100.000	
8	Amolengu	74.05.23.2008	7.142.857	1.758.143	8.901.000	
9	Ulunese	74.05.23.2009	7.142.857	1.720.143	8.863.000	
10	Langgapulu	74.05.23.2010	7.142.857	2.567.143	9.710.000	
<b>24</b>	<b>SABULAKOA</b>		<b>64.285.714</b>	<b>29.259.286</b>	<b>93.545.000</b>	
1	Sabulakoa	74.05.24.2001	7.142.857	3.092.143	10.235.000	
2	Talumbinga	74.05.24.2002	7.142.857	2.008.143	9.151.000	
3	Tetenggabo	74.05.24.2003	7.142.857	3.928.143	11.071.000	
4	Watu-Watu	74.05.24.2004	7.142.857	2.363.143	9.506.000	
5	Koronua	74.05.24.2005	7.142.857	7.032.143	14.175.000	
6	Ulu Sabulakoa	74.05.24.2006	7.142.857	1.350.143	8.493.000	
7	Asaria	74.05.24.2007	7.142.857	4.466.143	11.609.000	
8	Wawobende	74.05.24.2008	7.142.857	2.823.143	9.966.000	
9	Wonua Koa	74.05.05.2028	7.142.857	2.196.143	9.339.000	
<b>25</b>	<b>ANDOULO BARAT</b>		<b>71.428.571</b>	<b>48.579.429</b>	<b>120.008.000</b>	
1	Papawu	74.05.25.2001	7.142.857	1.969.143	9.112.000	
2	Anese	74.05.25.2002	7.142.857	3.148.143	10.291.000	
3	Bekenggasu	74.05.25.2003	7.142.857	3.695.143	10.838.000	
4	Watumokala	74.05.25.2004	7.142.857	8.763.143	15.906.000	
5	Mataupe	74.05.25.2005	7.142.857	4.976.143	12.119.000	
6	Bima Maroa	74.05.25.2006	7.142.857	7.580.143	14.723.000	
7	Wawobende	74.05.25.2007	7.142.857	4.416.143	11.559.000	
8	Lapoa Indah	74.05.25.2008	7.142.857	5.196.143	12.339.000	
9	Puundoho	74.05.25.2009	7.142.857	4.073.143	11.216.000	
10	Mataiwoi	74.05.25.2010	7.142.857	4.762.143	11.905.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>2.400.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	

BUPATI KONAWE SELATAN,

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA DPMD	
4. KABAG HUKUM	W
5.	
6.	



SURUNUDDIN DANGGA